

BAB IV
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Umum Kabupaten Jembrana

Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan salah satu wilayah yang strategis di Bali, hal ini dapat dilihat dari keadaan alam (keadaan fisik Dasar, keadaan geologi) dan potensinya (potensi sumber alam, potensi sumber daya manusia, potensi ekonomi).

a. Keadaan Fisik Dasar

Kabupaten Jembrana memiliki luas daerah 84.184 Ha, dengan daerah tertinggi di desa Munduk Kendung dan daerah terendah di desa Pengambangan. Kabupaten dikelilingi oleh lautan dan pegunungan, karena terletak di ujung barat Pulau Bali. Adapun batas-batas kabupaten Jembrana, antara lain:

- 1) Di sebelah Utara terdapat Gunung Merbuk
- 2) Di sebelah Timur terdapat Kabupaten Tabanan
- 3) Di sebelah Selatan terdapat Samudera Indonesia
- 4) Di sebelah Barat terdapat Selat Bali

Dalam konteks Regional Bali, maka kedudukan geografis wilayah Kabupaten Jembrana mempunyai peran yang strategis dalam rangka menunjang laju pertumbuhan dan perkembangan

daerah sekitarnya, terutama daerah pengaruh yang terdekat yaitu Kabupaten Tabanan. Oleh sebab itu dalam penyusunan pembangunan daerah Bali, Kabupaten Jembrana diarahkan sebagai salah satu pusat pengembangan wilayah daerah daratan rendah bagian barat di Pulau Bali.

b. Keadaan Geologi

Keadaan tanah di wilayah Kabupaten Jembrana relatif baik, adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian tengah merupakan dataran rendah sebagai pusat kota sehingga merupakan daerah yang sudah terbangun.
- 2) Bagian utara merupakan dataran tinggi dengan keadaan yang subur dan cukup luas yang cocok untuk perkebunan dan pertanian.
- 3) Bagian timur merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang luas dengan keadaan yang subur.
- 4) Bagian selatan merupakan daerah dataran rendah sebagai daerah perikanan.
- 5) Bagian barat merupakan dataran rendah yang juga sebagai daerah perikanan.

c. Potensi Sumber Daya Alam

Keadaan geografis baik dalam konteks regional Bali maupun wilayah pengembangan Kabupaten Jembrana memiliki potensi yang cukup besar karena:

- 1) Merupakan dataran rendah yang dapat berfungsi sebagai sarana transportasi dan laut yang efektif dalam arus lalu-lintas perdagangan.
- 2) Keadaan tanah yang cocok untuk lahan pertanian pangan maupun hortikultura.
- 3) Udara laut dibagian selatan dan barat Kabupaten Jembrana dapat di manfaatkan sebagai tempat-tempat wisata, dan peristirahatan.
- 4) Udara pegunungan di bagian utara dapat di manfaatkan sebagai sarana pertanian, wisata.

d. Potensi Sumber Daya Manusia

Dinamika kota selalu ditandai oleh urbanisasi yang pada mulanya dapat dikatakan sebagai kebutuhan untuk mengisi kegiatan ekonomi perkotaan. Dengan demikian pertambahan jumlah bukan semata-mata disebabkan oleh kelahiran, akan tetapi juga disebabkan oleh migrasi penduduk dari desa ke kota (urbanisasi). Penduduk sebagai sumber insani pembangunan memang sangat di butuhkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam arti semakin besar jumlah penduduk yang berkualitas, akan memberikan jaminan bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2001, penduduk Kabupaten Jembrana sejumlah 231.550 jiwa dan naik menjadi 234.208 jiwa pada tahun 2002 dengan

melihat hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata 1,12% pertahun.

e. Potensi Ekonomi

Sebagai daerah yang berperan sebagai lalu-lintas transportasi Jawa-Bali, maka jelas Kabupaten Jembrana mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan perkapita penduduknya yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

2. Visi dan Misi Kabupaten Jembrana

a. Visi Kabupaten Jembrana

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. Mampu menjadi perekat komponen kabupaten, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen selurus jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka visi Jembrana disusun sebagai berikut: Terwujudnya masyarakat Jembrana yang bahagia dan sejahtera, berkeadilan dan berdaya yang dilandasi iman dan taqwa serta di dukung oleh sumber daya alam dan sumber daya

manusia yang berkualitas serta memiliki semangat mekepong untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Penjelasan tentang visi Jembrana:

- 1) Masyarakat yang bahagia dan sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan fisik minimumnya serta kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat.
- 2) Berkeadilan maksudnya masyarakat merasakan rasa adil dan persamaan kedudukan.
- 3) Berbudaya maksudnya masyarakat yang memiliki totalitas wujud ide/gagasan kompleks aktivitas/perilaku berpola serta hasil karya.
- 4) Iman dan taqwa adalah kondisi mental spiritual dimana masyarakat mengikuti ajaran agamanya dan menjauhi larangannya.
- 5) Semangat mekepong merupakan karakteristik masyarakat Jembrana untuk menjadi yang terbaik.

b. Misi Kabupaten Jembrana

Untuk mewujudkan visi Jembrana tersebut diatas, ditetapkan misi sebagai berisi:

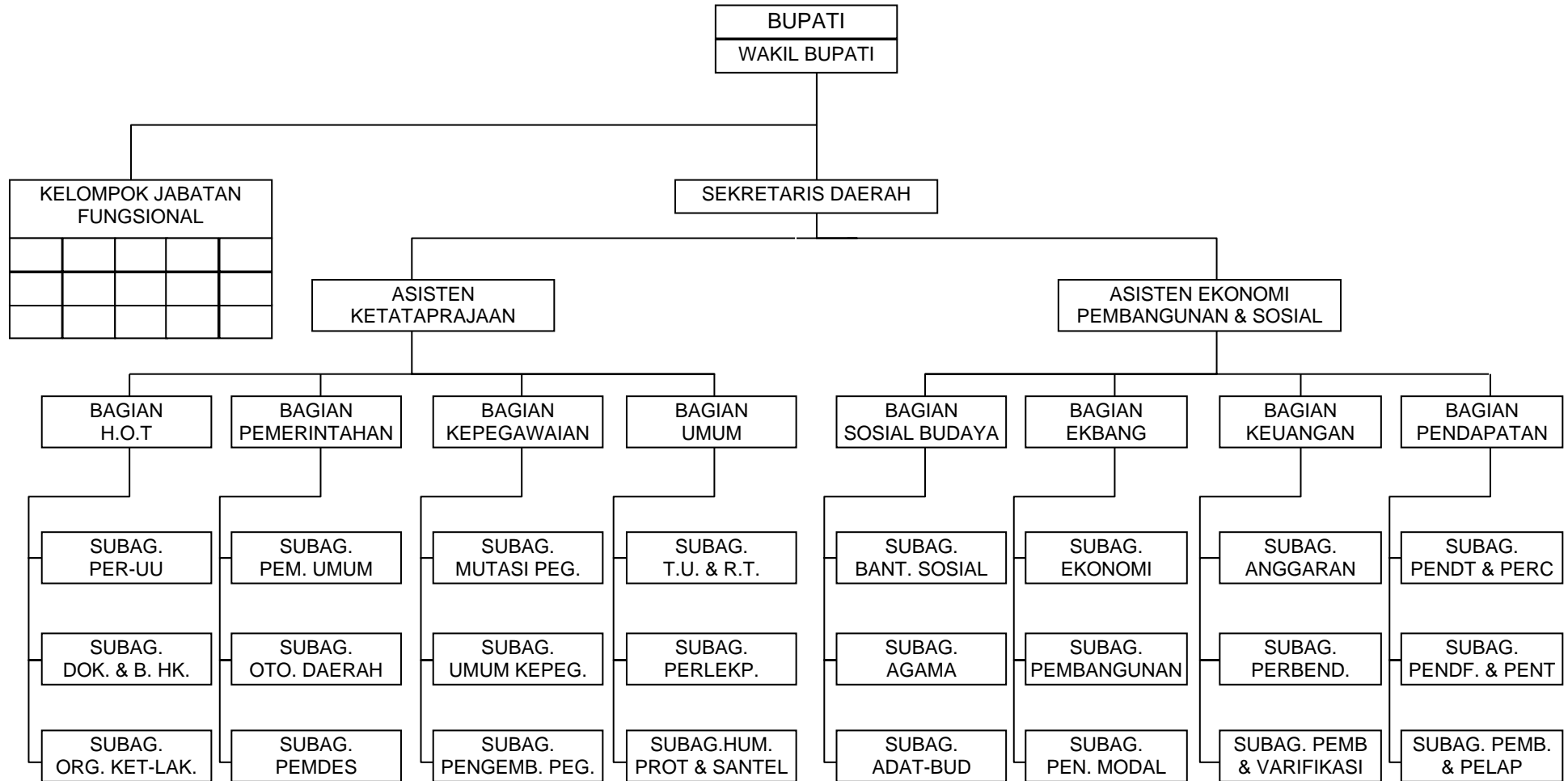
- 1) Memberdayakan ekonomi rakyat dengan meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas untuk menunjang sektor pariwisata, industri dan perdagangan disamping sektor lainnya.

- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mewujudkan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali melalui penegakan kedaulatan rakyat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara serta memberdayakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial politik.
- 4) Mewujudkan supremasi hukum bagi setiap masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 5) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keamanan serta memantapkan kerukunan umat beragama yang toleransi dan damai.
- 6) Mengembangkan sistem administrasi pemerintah dan pembangunan yang efektif, efisien dan transparan serta menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa serta senantiasa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

3. stuktur organisasi sekretariat Kabupaten Jembrana

Struktur organisasi pemerintah daerah kabupaten Jembrana sebagai berikut:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



4. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

A. Tugas pokok dan fungsi bagian pendapatan:

1. Memberi tugas kepada bawahan, baik secara lisan dan tertulis agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan
2. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas agar hasil kerja bawahan sesuai dengan yang diharapkan
3. Membuat rencana kerja tahunan bagian pendapatan untuk dijadikan acuan kerja bagian pendapatan dalam bentuk rencana anggaran satuan kerja bagian pendapatan sekretariat daerah Kabupaten Jembrana
4. Melaksanakan pendapatan potensi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Jembrana
5. Mendaftarkan dan menetapkan wajib pajak dan wajib retribusi daerah Kabupaten Jembrana
6. Membukukan, melaporkan dan mengevaluasi pengelolaan pendapatan daerah kepada Bupati Jembrana melalui Sekretaris daerah Kabupaten Jembrana
7. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diperintahkan atasan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Sekda melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial.

B. Bagian pendapatan terdiri dari:

1) Sub bagian pendataan dan perencanaan.

Sub bagian pendataan dan perencanaan mempunyai tugas pokok mandata dan merencanakan pendapatan asli daerah. Dalam menjalankan tugas pokok, sub bagian pendataan dan perencanaan mempunyai fungsi membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan sub bagian, memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar:

Sub. Bagian pendataan dan perencanaan mempunyai tugas:

- a. Membagi tugas kepada bawahan, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas – tugas dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar hasil kerja sesuai dengan yang di harapkan.
- c. Melaksanakan kegiatan pendataan untuk memperoleh data perpajakan/retribusi daerah dari masing – masing WP/WR.
- d. Meningkatkan potensi – potensi PAD yang baru untuk dapat di jaring sebgai sumber Pendapatan Asli Daerah.
- e. Menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya pajak terhadap pembangunan daerah.
- f. Melaksanakan kegiatan pendataan untuk memperoleh data perpajakan/retribusi (PDRD) dari masing – masing WP/WR.

- g. Menyusun rencana anggaran Sub Bagian untuk di ajukan kepada atasan.
- h. Memberikan dan menilai hasil kerja bawahan berdasarkan petunjuk dan pedoman yang berlaku agar sesuai dengan yang di harapkan.
- i. Melaksanakan tugas – tugas dinas lainnya yang di perintahkan.

2) Sub bagian pendaftaran dan penetapan.

Sub. Bagian pendaftaran dan penetapan mempunyai tugas pokok membuat daftar dan penetapan wajib pajak dan wajin retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, sub pendaftaran dan penetapan mempunyai fungsi membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan sub. Bagian, memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Sub. Bagian pendaftaran dan penetapan mempunyai tugas:

- a. Membagi tugas kepada bawahan, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas – tugas dapat terlaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- b. Memeriksa dan menilai kerja staf/bawahan Sub. Bagian Pendaftaran dan penetapan bagian pendapatan sektertaris daerah Kabupaten Jembrana.

- c. Melaksanakan pendaftaran dan merencanakan penetapan pajak dan retribusi daerah kabupaten Jembrana.
- d. Melaksanakan evaluasi pendaftaran dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
- e. Mencatat ke dalam kartu jenis pajak/retribusi masing – masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar daftar SKP, daftar SKR, daftar SKP rampung pajak hotell dan pajak hiburan dan daftar SKP sementara.
- f. Merencanakan anggaran Sub Bagian pendaftaran dan penetapan bagian pendapatan sekretariat daerah kabupaten jembrana.
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan atasan.

3) Sub bagian pembukuan dan pelaporan.

Sub bagian Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membuat pembukuan secara sistematis dan menyiapkan laporan secara periodik mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub. Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Sub. Bagian, memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Sub. Bagian pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas:

- a. Membagi tugas kepada bawahan, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas – tugas dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar hasil kerja bawahan sesuai dengan yang di harapkan.
- c. Membukukan dan mengevaluasi realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pungutan lainnya yang sah.
- d. Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah di catat dengan memberi nomor urut file.
- e. Menjumlahkan kartu jenis WP/WR untuk kolom penetapan dan kolom penyetoran pada setiap akhir bulan.
- f. Membuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis pajak / retribusi yang telah di jumlahkan kolom penetapan dan kolom penyetoran.
- g. Menjumlahkan kartu WP/WR untuk masing – masing WP/WR atas kolom penetapan dan kolom penyetoran pada setiap akhir bulan.
- h. Melaporkan realisasi penerimaan pajak daerah / retribusi daerah serta pungutan lainnya yang sah kepada kepala bagian pendapatan.
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan atasan.

5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan, murni digali dari daerah itu sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan di daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan. PAD merupakan pencerminan dari kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri dan juga dapat mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) dapat diperoleh oleh Kabupaten Jembrana di pergunakan untuk semua kegiatan pemerintah terutama untuk pembangunan daerah Kabupaten Jembrana. Adapun pendapatan asli daerah adalah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, pendapatan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Pemerintah kabupaten Jembrana dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jembrana sebelum dan setelah adanya otonomi daerah dalam rangka memenuhi tugasnya untuk mencari dana atau dalam mengisi kas daerah tidak hanya mencari target yang di canangkan saja, tetapi merupakan kewajiban untuk berusaha meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan Asli daerah dari tahun sebelumnya.

Dinas pendapatan daerah kabupaten Jembrana berusaha memenuhi target sekaligus berusaha meningkatkan penerimaan dana dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan jalan

mengintensifikasi untuk mengimbangi pembangunan yang terus berjalan, sedangkan dari waktu ke waktu dana untuk pembangunan meningkat dengan pesat, seakan sulit untuk mengimbangnya. Tetapi ini merupakan tugas dan kewajiban kita bersama untuk memenuhi keseimbangan itu agar pembangunan semakin berjalan.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah dan lain- lain pendapatan daerah yang sah, harus di arahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber – sumber penerimaan dari pusat.

a. Pendapatan asli daerah sebelum otonomi daerah

Pendapatan asli daerah sebelum otonomi daerah di Kabupaten Jembrana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Adapun pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana sebelum otonomi daerah dimulai tahun 1995-1999 serta perkembangan target realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana tahun 1995-1999 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1
 Presentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
 Terhadap Targetnya Sebelum Otonomi Daerah
 Kabupaten Jembrana Tahun 1994-1999
 (Dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	1995	1.662.935.500,00	1.610.722.296,28	96,86 %
2	1996	2.622.241.700,00	2.046.850.073,95	78,06 %
3	1997	3.076.703.000,00	2.486.001.181,62	80,80%
4	1998	3.305.270.992,85	3.150.480.481,32	95,32 %
5	1999	2.348.573.000,00	3.418.021.866,05	145,54 %
	Rata-rata	2.603.144.838,00	2.542.415.179,00	99,32%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana,2005

Dari tabel dapat diketahui bahwa prosentase realisasi dari ditetapkannya target yakni berturut-turut dari tahun anggaran 1995-1999 : 96,86 %, 78,06 %, 80,80 %, 95,32 % dan 145,54 %. Berarti hanya pada tahun 1999 yang mampu memenuhi target atau Ratio efektivitas yang baik serta dapat memenuhi targetnya. Realisasi yang paling besar pada tahun 1999 yaitu 145,54 %, sedangkan yang paling rendah pada tahun 1996 yaitu 78,06 %. Tidak terpenuhinya target ini di sebabkan karena masyarakat kurang sadar akan pembayaran pajak, serta fungsi retribusi sehingga mengabaikan kewajiban untuk membayar jenis iuran. Namun demikian realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dapat di lihat pada table 2 berikut.:

Tabel 2
LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM OTONOMI DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
Tahun Anggaran 1995 Sampai dengan 1999
(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	1995			1996			1997			1998			1999		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.662.935.500,00	1.610.722.296,28	96,86	2.622.241.700,00	2.046.850.073,95	78,06	3.076.703.000,00	2.486.001.181,62	80,80	3.305.270.992,85	3.150.480.481,32	95,32	2.348.573.000,00	3.418.021.866,05	145,54
a.	Pajak Daerah	247.887.200,00	305.137.950,00	123,10	461.479.200,00	371.926.705,00	80,59	538.895.000,00	446.475.090,00	82,85	495.000.000,00	495.609.011,00	100,12	679.537.000,00	887.941.650,00	130,67
	1. Pajak Potong Hewan	5.640.000,00	10.525.800,00	186,63	20.000.000,00	15.022.600,00	75,11	22.000.000,00	16.545.750,00	75,21	-	-	-	-	-	-
	2. Pajak Pembangunan I	35.000.000,00	30.448.625,00	87,00	100.000.000,00	38.648.200,00	38,65	100.000.000,00	40.966.560,00	40,97	-	-	-	-	-	-
	3. Pajak Radio	7.100.200,00	6.175.600,00	86,98	8.900.200,00	13.493.900,00	151,61	9.900.000,00	9.837.300,00	99,37	-	-	-	-	-	-
	4. Pajak Bangsa Asing	58.000.000,00	178.000,00	306,90	60.000,00	162.000,00	270,00	100.000,00	30.000,00	30,00	-	-	-	-	-	-
	5. Pajak Keramaian	10.000.000,00	6.745.775,00	67,46	6.700.000,00	5.831.025,00	87,03	12.100.000,00	7.405.890,00	61,21	-	-	-	-	-	-
	6. Pajak Reklame	15.000.000,00	9.714.840,00	64,77	30.000.000,00	22.045.250,00	73,48	51.500.000,00	41.915.125,00	81,39	30.000.000,00	27.809.680,00	92,70	30.000.000,00	43.911.984,00	146,37
	7. Pajak Anjing	2.000.000,00	1.956.000,00	97,80	4.000.000,00	2.177.100,00	54,43	4.400.000,00	3.063.450,00	69,62	-	-	-	-	-	-
	8. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor	2.070.000,00	1.404.600,00	67,86	4.800.000,00	1.694.900,00	35,31	4.400.000,00	2.994.700,00	68,06	-	-	-	-	-	-
	9. Pajak Penerangan Jalan	165.000.000,00	233.884.210,00	141,75	280.000.000,00	270.017.480,00	96,43	326.531.000,00	321.752.565,00	98,54	350.000.000,00	365.078.375,00	104,31	497.037.000,00	662.494.045,00	133,29
	10. Pajak Bola Sodik/Bilyard	2.500.000,00	3.603.000,00	144,12	3.500.000,00	1.725.000.000,00	49,29	4.400.000,00	1.185.000,00	26,93	-	-	-	-	-	-
	11. Pajak Kendaraan di Atas Air	519.000,00	366.500,00	70,62	519.000,00	779.250,00	150,14	564.000,00	328.750,00	58,29	-	-	-	-	-	-
	12. Pajak Pelabuhan Perahu	3.000.000,00	135.000,00	4,50	3.000.000,00	330.000,00	11,00	3.000.000,00	450.000,00	15,00	-	-	-	-	-	-
	13. Pajak Hotel dan Restoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000,00	84.989.650,00	121,41	75.000.000,00	80.790.120,00	107,72
	14. Pajak Hiburan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	8.249.660,00	82,50	12.500.000,00	12.120.700,00	96,97
	15. Pajak Pengambilan dan Penggolongan Bahan Galian Golongan C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	4.247.000,00	42,47	15.000.000,00	15.159.465,00	102,24
	16. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	5.234.646,00	20,94	50.000.000,00	73.465.336,00	146,93
b.	Retribusi Daerah	1.173.133.300,00	1.119.381.771,28	95,42	1.772.590.500,00	1.486.400.826,86	83,85	2.045.423.000,00	1.706.388.396,47	83,42	2.012.100.000,00	1.650.307.074,18	82,02	1.472.620.000,00	1.199.182.101,00	81,43
	1. Pengujian Kendaraan Bermotor	23.440.000,00	25.430.000,00	108,49	30.375.000,00	26.980.000,00	88,82	34.000.000,00	28.260.000,00	83,12	-	-	-	-	-	-
	2. Leges - Zegel	33.735.000,00	34.954.500,00	103,61	50.608.000,00	52.598.000,00	103,93	61.200.000,00	58.213.500,00	95,12	-	-	-	-	-	-
	3. Dispensasi Jalan Dan Jembatan	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pemeriksaan Daging	3.040.000,00	2.543.500,00	83,67	4.403.000,00	2.919.000,00	66,30	4.843.500,00	3.069.500,00	63,37	-	-	-	-	-	-
	5. Sewa tanah	120.000.000,00	125.462.575,00	104,55	28.750.000,00	21.243.825,00	73,89	52.125.000,00	60.836.115,00	116,71	-	-	-	-	-	-
	6. Sempadan Ijin Bangunan(IMB)	55.000.000,00	59.092.638,61	107,44	150.000.000,00	104.625.455,86	69,75	165.000.000,00	104.649.485,92	63,42	100.000.000,00	97.922.988,68	97,92	100.000.000,00	85.245.400,00	85,25
	7. Pengalengan Ikan	25.000.000,00	12.310.055,00	49,24	70.000.000,00	16.176.808,00	23,11	70.000.000,00	32.597.672,00	46,57	-	-	-	-	-	-
	8. Ijin Perindustrian Kecil	2.542.500,00	2.266.825,00	89,16	3.051.500,00	2.022.700,00	66,29	3.351.500,00	3.333.800,00	99,47	-	-	-	-	-	-
	9. Stasiun Bus/Taxi	70.200.000,00	75.581.200,00	107,67	100.100.000,00	80.267.700,00	80,19	110.500.000,00	78.900.000,00	71,40	90.000.000,00	72.144.400,00	80,16	90.000.000,00	70.414.000,00	78,23
	10. RSU/ Balai Pengobatan	201.516.800,00	221.616.220,00	109,97	240.000.000,00	254.820.945,00	106,18	287.200.000,00	260.167.960,00	90,59	-	-	-	-	-	-
	11. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	5.000.000,00	1.080.000,00	21,60	5.000.000,00	720.000,00	14,40	5.500.000,00	704.500,00	12,80	2.500.000,00	2.051.000,00	82,04	2.500.000,00	2.375.200,00	98,22
	12. Pasar - pasar	296.000.000,00	299.170.559,67	101,07	400.000.000,00	392.591.393,00	98,15	459.000.000,00	429.152.798,55	93,49	500.000.000,00	474.096.693,00	94,82	500.000.000,00	541.661.971,00	102,65
	13. Pengeluaran Hasil Hutan dan Laut	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	121.838.950,00	60,92	220.000.000,00	143.942.865,00	65,42	-	-	-	-	-	-
	14. Kandang Rumah Hewan dan Potong	3.377.000,00	2.942.500,00	87,13	4.231.000,00	3.408.450,00	80,56	4.631.000,00	3.631.000,00	78,40	4.600.000,00	3.323.060,00	-72,24	3.500.000,00	3.359.000,00	98,22
	15. Kartu Ternak	9.765.000,00	5.836.900,00	59,77	14.765.000,00	5.977.700,00	40,49	16.165.000,00	6.274.700,00	38,81	-	-	-	-	-	-
	16. Sampah	50.000.000,00	18.925.550,00	37,85	75.000.000,00	46.760.900,00	62,35	85.500.000,00	76.942.250,00	89,99	100.000.000,00	75.886.200,00	75,89	100.000.000,00	104.386.100,00	104,39
	17. Pasar Hewan	1.353.000,00	1.130.300,00	83,54	2.163.000,00	1.299.300,00	60,07	2.363.000,00	1.397.500,00	59,14	-	-	-	-	-	-
	18. Parkir - parkir	228.020.000,00	205.123.950,00	89,96	340.000.000,00	330.874.200,00	97,32	407.500.000,00	378.537.250,00	92,89	175.000.000,00	168.831.850,00	96,48	185.000.000,00	128.852.650,00	69,65
	19. Ijin Usaha Ang. Kendaraan Bermotor	10.364.000,00	10.364.000,00	102,17	19.144.000,00	8.998.000,00	47,00	21.044.000,00	6.672.000,00	31,70	-	-	-	-	-	-

20. Ijin Tempat Usaha (HO)	35.000.000,00	15.230.500,00	43,52	35.000.000,00	12.277.500,00	35,08	38.500.000,00	29.105.500,00	75,59	15.000.000,00	11.599.500,00	77,33	15.000.000,00	10.425.000,00	69,50
21. Pajak Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.000.000,00	271.064.457,50	93,47	290.000.000,00	99.887.300,00	34,44
22. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685.000.000,00	442.813.000,00	64,64	90.000.000,00	87.158.050,00	98,55
23. Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000.000,00	22.750.710,00	87,50
24. Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.620.000,00	13.289.000,00	64,45
25. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Gilimanuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	30.573.925,00	61,15	50.000.000,00	29.377.070,00	58,75
c. Bagian Laba Usaha Daerah	50.640.000,00	50.640.000,00	100,00	94.997.000,00	23.266.247,09	24,49	52.000.000,00	0,00	-	61.784.992,85	309.437.617,37	500,83	82.573.000,00	82.573.000,00	100,00
1. P.D.A.M	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	58.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	61.784.992,85	309.437.617,37	500,83	-	-	-
2. B.P.D	25.640.000,00	25.640.000,00	100,00	36.997.000,00	23.266.247,09	62,89	52.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	82.573.000,00	82.573.000,00	100,00
d. Penerimaan Dinas - Dinas	69.775.000,00	45.698.358,00	65,49	181.525.000,00	94.476.503,00	52,05	209.901.000,00	161.156.984,00	76,78	-	-	-	-	-	-
1. Dinas Pertanian	7.050.000,00	8.248.140,00	116,9	10.000.000,00	10.079.655,00	100,80	13.406.000,00	8.849.845,00	66,01	-	-	-	-	-	-
2. Dinas Perikanan	59.475.000,00	33.671.468,00	56,61	60.775.000,00	36.782.083,00	60,52	61.925.000,00	44.812.140,00	72,36	-	-	-	-	-	-
3. Dinas Perkebunan	3.250.000,00	3.778.750,00	116,27	103.250.000,00	39.273.265,00	38,04	122.570.000,00	94.247.575,00	76,89	-	-	-	-	-	-
4. Dinas Kehutanan	0,00	0,00	-	7.500.000,00	8.341.500,00	111,25	12.000.000,00	13.247.242,00	110,39	-	-	-	-	-	-
e. Penerimaan Lain – Lain	121.500.000,00	89.864.217,00	73,96	111.650.000,00	70.779.792,00	63,39	230.483.000,00	171.980.711,15	74,62	736.386.000,00	695.126.778,77	94,40	87.843.000,00	1.248.325.115,00	1421,09
1. Hasil Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.000.000,00	3.293.050,00	109,77	500.000,00	0,00	-	6.343.000,00	6.963.800,00	102,66
2. Sewa Rumah Dinas	2.000.000,00	353.745,00	17,69	2.000.000,00	12.987.480,00	649,37	12.500.000,00	12.650.970,00	101,20	12.500.000,00	15.056.786,77	120,45	-	-	-
3. Jasa Giro	7.500.000,00	10.026.234,00	133,68	8.500.000,00	4.415.687,00	51,94	9.350.000,00	7.121.663,15	76,17	3.500.000,00	10.355.077,00	295,85	3.500.000,00	42.153.361,00	1024,55
4. KTP/ Kartu Keluarga	25.000.000,00	6.782.625,00	27,13	33.000.000,00	10.606.625,00	32,14	130.000.000,00	101.033.000,00	77,72	-	-	-	-	-	-
5. Sewa Wales	35.000.000,00	32.495.000,00	92,84	41.000.000,00	29.040.000,00	70,83	45.100.000,00	12.720.000,00	28,20	11.000.000,00	13.850.000,00	125,90	-	-	-
6. Penerimaan Lain – lain	52.000.000,00	40.206.613,00	77,32	27.150.000,00	13.730.000,00	50,57	30.533.000,00	35.162.028,00	115,16	77.939.000,00	88.487.120,00	113,53	3.000.000,00	1.084.916.759,00	612,47
7. Sumbangan Pihak Ke Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.947.000,00	567.377.796,00	89,92	75.000.000,00	114.291.195,00	152,39

Sumber data : Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana,2005

b. Pendapatan Asli Daerah pada saat otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana setelah pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 yaitu menjamin perkembangan dan pertumbuhan daerah, maka penyelenggaraan pemerintah harus di arahkan pada kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam otonomi daerah sistem pemerintahan akan berubah yang sebelumnya sistem yang digunakan adalah Sentralistik sedangkan pada saat otonomi sistem pemerintah yang digunakan adalah Desentralistik yang artinya Pemerintah yang dalam pengambilan suatu keputusan diserahkan oleh pemerintah di daerah. Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah, kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah itu dapat dilihat dari sumber - sumber pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan itu daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber daerahnya, sebab daerah harus mempunyai keuangan sendiri yang lebih kuat. Semakin besar keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan, baik fisik maupun spiritual. Semakin kuat kondisi keuangan daerah, maka daerah akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

Berkaitan dengan keuangan daerah, penggunaan PAD harus terus diupayakan agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pembiayaan terselenggaranya pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana setelah otonomi daerah diperlakukan mulai tahun 2000 sampai 2004 serta persentase realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana pada masa pelaksanaan otonomi daerah dari tahun 2000-2004 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3
 Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
 Terhadap Targetnya Pada Masa Otonomi Daerah
 Kabupaten Jembrana Tahun 1999-2004
 (Dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2000	2.647.174.716,85	2.551.526.749,70	96,39%
2	2001	4.788.420.000,00	5.540.224.419,07	115,70%
3	2002	6.000.000.000,00	11.555.147.609,80	199,26%
4	2003	9.277.444.548,17	11.055.956.008,86	119,17%
5	2004	9.785.500.000,00	9.785.325.554,89	100,00%
	Rata-rata	6.499.707.853,00	8.097.636.064,00	124,58%

Sumber Data: Dinas pendapatan Kabupaten Jembrana,2005

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa prosentase realisasi dari di tetapkannya target yakni berturut-turut dari tahun anggaran 2000-2004 : 96,39%, 115,70%, 199,26%,119,17%, 100,00%,. Berarti dari tahun anggaran 2000-2004 realisasi yang di peroleh kabupaten Jembrana dapat memenuhi targetnya kecuali pada tahun 2000 yang di sebabkan karena adanya retribusi daerah

dan laba usaha daerah yang kurang memenuhi targetnya. Tidak terpenuhinya target tersebut di karenakan masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya otonomi daerah sehingga mengabaikan kewajiban untuk membayar jenis iuran tersebut. Namun pada tahun ke tahun mendatang pendapatan asli daerah kabupaten Jembrana jauh lebih tinggi dari tahun yang sebelumnya,dan telah memenuhi Persyaratan dan target yang di harapkan yang dapat di lihat pada table 4 berikut:

Tabel 4.
LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH OTONOMI DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
Tahun Anggaran 2000 Sampai dengan 2004
(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2000			2001			2002			2003			2004		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4		3	4		3	4		3	4		3	4	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.647.174.716,85	2.551.526.749,70	96,39	4.788.420.000,00	5.540.224.419,07	115,70	6.000.000.000,00	11.555.147.609,80	192,59	9.277.444.548,17	11.055.956.008,86	119,17	9.785.500.000,00	9.785.325.554,89	100,00
f.	Pajak Daerah	739.537.000,00	754.395.741,59	102,01	1.502.089.785,00	1.482.258.940,00	98,68	1.348.947.280,00	2.134.637.845,65	158,24	2.085.000.000,00	2.617.806.090,00	128,14	2.835.000.000,00	3.031.985.686,25	106,95
	1. Pajak Hotel dan Restoran	125.000.000,00	62.683.926,00	50,15	421.507.200,00	68.950.152,50	16,36	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
	- Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	37.949.896,00	63,25	60.000.000,00	60.713.781,00	101,19	60.000.000,00	62.038.016,00	103,40
	- Pajak restoran	-	-	-	-	-	-	65.000.000,00	38.967.781,00	59,95	45.000.000,00	54.329.314,00	120,73	50.000.000,00	54.032.799,00	108,07
	2. Pajak Hiburan	12.500.000,00	32.799.800,00	262,40	38.974.280,00	17.199.500,00	44,16	38.947.280,00	28.328.700,00	72,74	20.000.000,00	23.573.138,00	117,87	20.000.000,00	30.313.200,00	151,57
	3. Pajak Reklame	30.000.000,00	86.556.629,00	288,52	57.500.000,00	112.019.555,00	194,82	80.000.000,00	223.449.101,00	279,31	200.000.000,00	324.427.702,50	171,21	225.000.000,00	352.135.200,00	156,50
	4. Pajak Penerangan Jalan	497.037.000,00	517.265.855,00	104,07	869.900.255,00	1.140.184.925,00	131,07	1.050.000.000,00	1.721.638.675,00	163,11	1.660.000.000,00	2.097.723.055,00	126,37	2.400.000.000,00	2.421.970.795,00	100,92
	5. Pajak Bahan Galian Gol C	25.000.000,00	24.943.918,50	99,78	53.885.050,00	52.845.652,50	98,07	55.000.000,00	93.303.662,65	169,64	100.000.000,00	93.039.100,00	93,04	80.000.000,00	111.949.929,00	139,37
	6. Pajak ABT	50.000.000,00	30.145.613,00	60,29	60.350.000,00	91.059.155,00	150,89	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
g.	Retribusi Daerah	1.620.620.000,00	1.206.633.749,00	79,35	2.464.172.215,00	2.188.590.884,65	88,96	3.245.552.700,00	2.506.381.306,42	77,23	1.834.226.000,00	1.747.197.278,15	95,26	1.983.500.000,00	1.986.116.707,00	100,64
	1. Restribusi Pelayanan Kesehatan	338.000.000,00	329.049.055,50	97,35	809.953.128,00	666.244.888,00	82,36	808.953.126,00	795.204.859,92	98,30	-	6.840.010,80	0,00	-	-	0,00
	2. Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan	100.000.000,00	65.348.050,00	65,35	100.000.000,00	105.077.300,00	105,08	110.000.000,00	110.429.700,00	100,39	120.000.000,00	132.298.675,00	110,25	120.000.000,00	141.637.000,00	118,03
	3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte	90.000.000,00	40.825.450,00	45,36	315.996.850,00	260.009.500,00	82,28	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
	4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	185.000.000,00	130.561.799,25	70,56	239.732.295,00	204.938.112,00	85,49	293.723.295,00	216.953.000,00	73,90	160.750.000,00	160.750.000,00	100,00	200.000.000,00	160.749.000,97	80,37
	5. Retribusi Pasar	500.000.000,00	391.542.734,25	78,31	607.266.506,00	524.744.84,25	86,41	607.266.506,00	547.779.363,50	90,20	360.000.000,00	360.000,000m00	100,00	50.000.000,00	360.000.000,00	72,00
	6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	41.684.000,00	92,89	26.000.000,00	84.389.000,00	324,57	99.476.000,00	141.461.000,00	142,21	100.000.000,00	166.687.000,00	166,69
	7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	26.000.000,00	33.561.799,25	129,08	32.727.436,00	30.400.886,40	91,55	37.903.941,00	48.467.240,00	127,87	28.000.000,00	95.404.760,00	340,73	70.500.000,00	78.887.900,00	111,90
	8. Retribusi Terminal	90.000.000,00	51.954.600,00	57,73	100.096.000,00	91.635.900,00	91,54	102.000.000,00	94.884.700,00	93,02	62.000.000,00	62.000.000,00	100,00	90.000.000,00	62.000.000,00	68,89
	9. Retribusi Rumah Potong Hewan	3.500.000,00	12.220.000,00	349,14	16.900.000,00	17.160.000,00	101,51	17.500.000,00	16.030.000,00	91,60	17.500.000,00	15.710.000,00	89,77	15.000.000,00	15.528.500,00	103,52
	10. Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga	2.500.000,00	1.451.500,00	58,06	2.500.000,00	1.926.000,00	77,04	4.000.000,00	1.404.900,00	35,12	2.500.000,00	722.200,00	28,89	1.000.000,00	482.400,00	48,24
	11. Retribusi Panjualan Produksi Usaha Daerah	20.620.000,00	12.799.100,00	61,97	25.000.000,00	28.946.010,00	115,78	28.850.000,00	88.157.025,00	305,57	109.000.000,00	33.185.763,00	30,45	32.000.000,00	63.401.975,00	198,13
	12. Retribusi Ijin Peruntukan	50.000.000,00	15.869.675,00	31,74	50.000.000,00	17.306.675,00	34,41	60.000.000,00	5.931.950,00	9,89	60.000.000,00	64.459.192,00	107,43	30.000.000,00	162.074.033,00	540,25
	13. Retribusi IMB	100.000.000,00	113.869.085,00	113,37	150.000.000,00	185.231.820,00	123,49	150.000.000,00	134.929.794,00	90,62	200.000.000,00	88.778.783,23	44,39	200.000.000,00	104.222.150,00	52,11
	14. Retribusi Ijin Gangguan (HO)	15.000.000,00	7.617.500,00	50,78	15.000.000,00	14.285.000,00	95,23	15.000.000,00	6.417.500,00	42,78	15.000.000,00	11.302.500,00	75,35	15.000.000,00	44.222.489,00	294,82
	15. Retribusi Pengawasan & pengendalian mutu hasil bumi	-	-	-	-	-	-	1.038.346.850,00	343.397.792,00	33,07	600.000.000,00	463.177.775,00	77,19	500.000.000,00	465.530.880,00	93,10
	16. Pelelangan Ikan	-	-	-	-	-	-	-	11.944.475,00	0,00	-	111.106.619,12	-	75.000.000,00	78.182.880,00	104,24
	17. Retribusi Jasa Usaha Penyedotan kakus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	11.950.000,00	79,67	
	18. Retribusi Pasar Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	80.559.500,00	402,79	
h.	Bagian Laba Usaha Daerah	359.174.716,85	332.802.289,13	92,66	330.000.000,00	373.769.072,60	113,26	330.000.000,00	1.069.861.012,27	324,20	858.218.548,17	858.218.548,17	100,00	900.000.000,00	896.367.695,76	99,59
i.	Lain-lain PAD	27.843.000,00	257.694.970,07	925,53	492.158.000,00	1.494.605.521,00	303,68	1.075.500.000,00	4.492.415.661,46	417,70	3.000.000.000,00	4.096.898.494,04	136,56	3.955.000.000,00	3.663.999.067,88	99,60
j.	Bunga Deposito	-	-	-	-	-	-	-	1.351.851.781,00	-	1.500.000.000,00	1.681.835.589,00	-	112.000.000,00	196.856.998,00	92,64

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perbedaan Sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah.

a. Pajak Daerah

Jenis – jenis penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jembrana untuk tahun 1995 sampai dengan 2004 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.
Jenis Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Jembrana 1995-2004
(dalam Rp.)

No.	Jenis Penerimaan	PAD Sebelum Otonomi Daerah					PAD Sesudah Otonomi Daerah				
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	Pajak Daerah Hewan	10.525.800,00	15.022.600,00	16.545.750,00							
2	Pajak Pembangunan I	30.448.625,00	38.648.200,00	40.966560,00							
3	Pajak Radio	6.175.600,00	13.493.900,00	9.837.300,00	-	-					
4	Pajak Bangsa Asing	178.000,00	162.000,00	30.000,00	-	-					
5	Pajak Keramaian	6.745.775,00	5.831.025,00	7.405.890,00	-	-					
6	Pajak Reklame	9.714.840,00	22.045.250,00	41.915.125,00	27.809.680,00	43.911.984,00	86.556.629,00	112.019.555,00	223.449.131,00	342.427.702,50	352.135.347,25
7	Pajak Anjing	1.956.000,00	2.177.100,00	3.063.450,00	.	.					
8	Pajak kendaraan tak Bermotor	1.404.600,00	1.694.900,00	2.994.700,00							
9	Pajak Penerangan Jalan	233.840.210,00	270.017.480,00	321.752.565,00	365.078.375,00	662.494.045,00	517.265.855,00	1.140.184.925,00	1.712.638.675,00	2.097.723.055,00	2.421.970.795,00
10	Pajak BolaSodok/Bilyard	3.603.000,00	1.725.000.000,00	1.185.000,00	-	-					
11	Pajak Kendaraan di atas Air	366.500,00	779.250,00	328.750,00	-	-					
12	Pajak Pelabuhan Perahu	135.000,00	330.000,00	450.000,00	-	-					
13	Pajak Hotel dan Restoran				84.989.650,00	80.790.120,00	62.683.926,00	68.950.152,50	76.917.677,00	115.043.095,00	116.070.815,00
14	Pajak hiburan				8.249.660,00	12.120.700,00	32.799.800,00	17.199.500,00	28.328.700,00	23.573.138,00	30.313.200,00
15	Pajak Pengambilan dan Penggolongan Bahan Galian C				4.247.000,00	15.159.465,00	24.943.918,50	52.845.652,50	93.303.662,65	93.039.100,00	111.494.929,00
16	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan				5.234.646,00	73.465.336,00	30.145.613,00	91.059.155,00			
Jumlah		305.137.950,00	371.926.705,00	446.475.090,00	495.609.011,00	887.941.650,00	754.395.741,50	1.482.258.940,00	2.134.637.845,65	2.671.806.090,50	3.031.985.686,25
Rata-rata		501.418.081,20					2.015.016.541,00				

Sumber data: Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana,2005.

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadinya suatu perbedaan pendapatan akibat adanya otonomi daerah, di lihat pada tingkat pendapatan hingga mencapai 100% dari pajak daerah sebelumnya otonomi daerah. Sebelum adanya otonomi daerah jenis – jenis pos pajak daerah terdiri dari pajak potong hewan, pajak pembangunan I, pajak radio, pajak bangsa asing, pajak keramaian, pajak reklame, pajak anjing, pajak kendaraan tak bermotor, pajak penerangan jalan, pajak bola sodok/bilyard, pajak kendaraan di atas air, pajak pelabuhan perahu sedangkan setelah adanya otonomi daerah pada tahun 1998/1999 jenis – jenis pos pajak meliputi pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan dan penggalan golongan C. Terlihat jelas bahwa jenis pos pajak daerah sebelum dan pada saat otonomi daerah lebih banyak di bandingkan dengan sebelum adanya otonomi daerah ini di karenakan :

- 1) Dimana telah di tetapkan Undang – undang RI No 34 yang mengatur dan menetapkan jenis – jenis pajak yang di pungut oleh daerah sehingga terlihat jelas pajak – pajak yang terkait dan menambah pendapatan daerah.
- 2) Menurut daerah banyak pajak sebelum otonomi daerah tidak layak untuk di pungut seperti pajak contohnya pajak anjing, pajak kendaraan tak bermotor. Seperti pajak anjing yang pemungutannya sudah tidak berlaku lagi karena di nilai tidak

efektif dan saat ini telah di hapuskan sehingga tidak terlalu menambah penerimaan daerah.

- 3) Adanya pengklasifikasian terhadap pos- pos pajak daerah tersebut sehingga di kelompokkan menurut fungsi dan tempatnya. Seperti pajak radio dan keramaian yang saat ini telah di masukkan menjadi pajak hiburan.
- 4) Di lihat dari besarnya jumlah pajak sebelum adanya otonomi daerah lebih kecil dari pada saat otonomi daerah yang di karenakan pemerintah dalam pemungutannya lebih di awasi dan di perhatikan sehingga dapat lebih menambah jumlah penerimaan daerah itu sendiri.

Di lihat juga dalam pajak daerah sebelum adanya otonomi daerah kontribusi terbesar berasal di pajak penerangan jalan, dan setelah otonomi masih tetap di peroleh dari pajak penerangan jalan di tambah dengan pajak hiburan.

b. Retribusi Daerah

Jenis - jenis penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Jembrana tahun 1995 sampai dengan 2004 di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.
Jenis Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten Jembrana 1995-2004
(dalam Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	PAD Sebelum Otonomi Daerah					PAD Sesudah Otonomi Daerah				
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	Pengujian Kendaraan Bermotor	25.430.000,00	26.980.000,00	28.260.000,00				41.684.000,00	84.389.000,00	141.461.000,00	166.687.000,00
2	Legel-zegel	34.954.500,00	52.598.000,00	58.213.500,00							
3	Dispensasi Jalan dan Jembatan	320.000,00	0	0							
4	Pemeriksaan Daging	2.543.500,00	2.919.000,00	3.069.500,00							
5	SewaTanah	125.462.575,00	21.243.825,00	60.836.115,00							
6	Sempadan Ijin Bangunan (IMB)	59.092.638,61	104.625.455,86	104.649.485,92	97.922.988,68	85.245.400,00	113.869.085,00	185.231.820,00	134.929.794,00	88.778.783,23	104.222.150,00
7	Pengalangan Ikan	12.310.055,00	16.176.808,00	32.597.672,00					11.944.475,00	111.106.619,12	78.182.680,00
8	Ijin Industri Kecil	2.266.825,00	2.022.700,00	3.333.800,00							
9	Stasiun Bis / Taxi	75.581.200,00	80.267.700,00	78.900.000,00	72.144.400,00	70.414.000,00	51.954.600,00	91.635.900,00	94.884.700,00	62.000.000,00	62.000.000,00
10	RSU / Batai Pengobatan	221.616.220,00	254.820.945,00	260.167.960,00							
11	Tempat Rekreasi	1.080.000,00	720.000,00	704.500,00	2.051.000,00	2.375.200,00	1.451.500,00	1.926.000,00	1.464.900,00	722.200,00	482.400,00
12	Pasar-pasar	299.170.559,67	392.591.393,00	429.152.796,55	474.096.693,00	541.661.971,00	391.542.734,25	524.744.843,25	547.779.363,50	360.000.000,00	360.000.000,00
13	Pengeluaran Hasil Hutan dan Laut	0	121.838.950,00	143.942.865,00							
14	Kandang Hewan Rumah / Potong	2.942.500,00	3.408.450,00	3.631.000,00	3.323.060,00	3.359.000,00	12.220.000,00	17.160.000,00	16.030.000,00	15.710.000,00	15.528.500,00
15	KartuTemak	5.836.900,00	5.977.700,00	6.274.700,00							
16	Sampan	18.925.550,00	46.760.900,00	76.942.250,00							
17	PasarHewan	1.130.300,00	1.299.300,00	1.397.500,00							80.559.500,00
18	Parkir-parkir	205.123.950,00	330.874.200,00	378.537.250,00	168.831.850,00	128.852.650,00	130.545.200,00	204.938.112,00	216.953.000,00	160.750.000,00	160.749.999,97
19	Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor	10.364000,00	8.998.000,00	6.672.000,00							
20	Ljin Tempat Usaha (HO)	15.230.500,00	12,277.500,00	29.105.500,00	11.590:500,00	10.425.000,00	7.617.500,00	14.285.000,00	6.417.500,00	11.302.500,00	44.222.489,00
21	Pelayanan Kasahatan				271.886.200,00	99.887.300,00	329.049.055,50	666.244.888,00	796.204.869,92	6.840.010,80	
22	Pelayanan Persampahan / Kebereihan				75.886.200,00	104.386.100,00	65.348.050,00	105.077.300,00	110.429.700,00	132.298.675,00	141.637.000,00
23	Pergantian Biaya Cetak / KTP dan Akte Catalan Sipil				442.813.000,00	87.158.050,00	40.825.450,00	260.009.500,00			
24	Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Gilimanuk				30.573,925,00	29.377.070,00	15.869.675,00	17.306.675,00	5.931.950,00	64.459.192,00	162.074.033,00
25	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					22.750.710,00	33.561.799,25	30.400.836,40	48.467.240,00	95.404.760,00	78.887.900,00
26	Retribuei Penjualan Produksi Usaha Daerah					13.289.000,00	12.779.100,00	28.946.010,00	88.157.025,00	33,185.763,00	63.401.975,00
27	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Bumi								343.397.792,00	463.177.775,00	465.530.880,00
28	Riartbusi Jasa Penyedotan Kakus										
Jumlah		1.119.381.771,28	1.486.400.828,86	1.706.388.396,47	1.650.307.074,00	1.199.182.101,00	1.206.633.749,00	2.189.590.884,65	2.506.381.309,42	1.747.797.278,15	1.996.116.707,00
Rata-rata		1.432.332.034,00					1.927.183.985,00				

Sumber data: Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.,2005

Dari tabel di atas jenis retribusi sebelum adanya otonomi daerah dan setelah adanya otonomi mengalami perbedaan karena menurut daerah pada saat otonomi daerah hanya jenis – jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk di jadikan sebagai obyek retribusi seperti yang telah di atur dalam UU No 18 Tahun 1997 tentang retribusi daerah. Untuk jenis – jenis retribusi pada saat sebelum otonomi daerah lebih banyak di bandingkan dengan retribusi saat otonomi daerah karena dalam menetapkan saat otonomi di atur dengan peraturan pemerintah daerah yang di maksudkan agar terciptanya ketertiban dalam peraturan, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan di sesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan dan memerlukan klasifikasi menurut jasa usahanya. Jika di lihat dari retribusi tersebut yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari retribusi pasar, retribusi RSUD dan retribusi parkir di mana dari sebelum adanya otonomi dan pada saat adanya otonomi selalu menambah penerimaan daerah.

c. Laba usaha daerah

Jenis – jenis penerimaan usaha daerah kabupaten Jember tahun 1995 sampai dengan 2004 di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.
 Jenis Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah
 Kabupaten Jembrana 1995-2004
 (dalam Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	PAD Sebelum Otonomi Daerah					PAD Sesudah Otonomi Daerah				
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1.	P.D.A.M.	25.000.000,00	-	-	309.437.017,37	-	-	-	-	-	-
2.	B.P.D	25.640.000,00	23.266.247,09	-	0	82.573.000,00	332.802.289,13	373.769.072,60	1.069.861.012,27	858.218.548,17	896.367.695,76
Jumlah		50.640.000,00	23.266.247,09	-	309.437.017,37	82.573.000,00	332.802.289,13	373.769.072,60	1.069.861.012,27	858.218.548,17	896.367.695,76
Rata-rata		93.183.252,88					706.203.723,50				

Sumber data: Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.2005

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa bagian laba BUMD ini dapat di lihat dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang di pisahkan. Untuk pos penerimaan daerah dari pos bagian laba BUMD pada pemerintah daerah kabupaten Jembrana hanya memanfaatkan bagian laba dari saham yang di tanamkan pada Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) kabupaten Jembrana, sedangkan untuk bagian laba perusahaan daerah, yang dalam hal ini di Jembrana adalah PDAM, dalam SK Bupati Nomor 328 tahun 2001 tentang “Pungutan sumbangan pihak ketiga kepada para pengusaha swasta, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik Negara di kabupaten jembrana”. Pada tahun 1997 dapat kita lihat tidak ada pemasukan di karenakan laba dari masing – masing badan usaha ternyata tidak sebesar penetapan tarif per tahun pada saat itu, i sehingga belum bisa menyetorkan bagian laba kepada pemerintah, hal ini di sebabkan karena PDAM masih pada masa peningkatan teknologi pelayanan kepada masyarakat. Jika di lihat dari pos laba BUMD ini kontribusi terbesar berasal dari Bank Pembangunan Daerah.

d. Lain – lain penerimaan yang sah

Jenis – jenis penerimaan lain- lain yang sah di kabupaten jembrana tahun 1995 sampai 2004 di sajikan pada tabel :

Tabel 8.
Jenis Penerimaan Pendapatan Lain-lain yang Sah
Kabupaten Jembrana 1995-2004
(dalam Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	PAD Sebelum Otonomi Daerah					PAD Sesudah Otonomi Daerah				
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1.	Hasil Milik Daerah	0	0	3.293.050,00	0	6.963.800,00	-	-	-	-	-
2.	Sewa Rumah Dinas	353.745,00	12.987.480,00	12.650.970,00	15.056.786,77	-	-	-	-	-	
3.	Penerimaan Dinas-dinas	45.698.358,00	94.476.503,00	161.156.984,00	-	-	-	-	-	-	
4.	Jasa Biro	10.026.234,00	4.415.687,00	7.121.663,15	10.355.077,00	42.153.361,00	-	-	1.528.824.337,46	1.019.087.163,25	-
5.	KTP / Kartu Keluarga	6.782.625,00	10.606.625,00	101.033.000,00	-	-	-	-	-	-	
6.	Sewa Wales	32.495.000,00	29.040.000,00	12.720.000,00	13.850.000,00	-	-	-	-	-	
7.	Penerimaan Lain-lain	40.206.613,00	13.730.000,00	35.162.028,00	88.487.120,00	1.084.916.759,00	257.694.970,07	1.494.605.512,00	674.714.202,00	479.213.388,79	3.663.999.067,00
8.	Sumbangan Pihak Ke III				567.377.796,00	114.291.195,00	-	-	2.288.877.122,00	2.598.597.942,00	-
9.	Bunga Deposito								1.351.851.781,00	1.681.835.598,00	196.856.998,00
Jumlah		135.562.575,00	165.256.295,00	333.137.695,15	695.126.778,77	1.248.325.115,00	257.694.970,07	1.494.605.512,00	5.844.267.442,46	5.778.734.083,04	3.860.856.065,88
Rata-rata		515.481.691,80					3.447.231.616,00				

Sumber data: Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.2005

Dari tabel di atas dapat disimpulkan dalam pos – pos penerimaan ini berisi tentang penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pos pajak daerah, retribusi daerah, dan pos bagian laba usaha BUMD. Pada pos penerimaan lain yang sah ini mengalami peningkatan yang pesat, di mana sebelum adanya otonomi daerah besarnya pendapatan asli daerah hanya di bantu dengan pendapatan dari dinas – dinas saja, setelah otonomi daerah pendapatan setiap dinas (pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan) telah di tiadakan dan daerah dalam pendapatannya menggali sendiri kemampuan yang ada di dalam daerahnya. Perbedaan ini juga di akibatkan adanya bunga deposito yang menjadi penerimaan tambahan daerah yang mampu menambah pendapatan daerah setelah adanya otonomi daerah. Jika di lihat dari data di atas penerimaan lain – lain yang sah kontribusi terbesar berasal dari sumbangan pihak ke tiga dan bunga deposito daerah.

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan besarnya perbedaan Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah sebelum dan setelah adanya otonomi daerah yang di peroleh adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan setelah
otonomi daerah tahun 1995 sampai dengan 2004
(dalam Rupiah)

No	Sumber – sumber Penerimaan daerah	Rata – Rata PAD Sebelum Otonoda	Rata – Rata PAD Setelah Otonoda
1	Pajak Daerah	501.418.081,20	1.804.216.741,00
2	Retribusi Daerah	1.432.332.034,00	1.929.183.985,00
3	Laba Usaha Daerah	93.183.372,88	706.203.723,50
4	Pendapatan Lain – lain yang sah	515.481.691,80	3.447.231.614,00
	Jumlah Rata – rata PAD	2.542.415.179,88	8.095.636.186,50

2. Menghitung pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Setelah membandingkan atau melihat adanya suatu perbedaan dalam pendapatan sebelum adanya otonomi daerah dan pada saat adanya otonomi daerah maka selanjutnya mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah sebelum adanya otonomi daerah dan setelah adanya otonomi daerah, dengan menggunakan rumus:

$$r = \left\{ \left(\frac{t_n}{t_0} \right)^{\frac{1}{n-1}} - 1 \right\} \times 100$$

Keterangan:

r = tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah

t_n = data tahun terakhir periode

t_0 = data tahun awal periode

Dengan rumus tersebut maka di ketahui besarnya pertumbuhan pendapatan asli daerah adalah:

Tabel 10
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 1995 sampai 2004
(dalam %)

PAD sebelum otonomi daerah		PAD setelah otonomi daerah	
Tahun	Pertumbuhan	Tahun	Pertumbuhan
1995	-	2000	-25,35
1996	27,07	2001	117,12
1997	21,45	2002	108,56
1998	26,72	2003	-4,32
1999	8,49	2004	-11,45
Rata - rata	7,29	Rata – rata	36,91

Sumber: data diolah 2004

3. Menghitung Rasio Efektifitas

Dengan menggunakan tabel 1 dan tabel 2 di atas dapat di ketahui besarnya rasio efektifitas dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Tabel 11
 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 Tahun 1995 sampai 2004
 (dalam %)

PAD sebelum otonomi daerah		PAD setelah otonomi daerah	
Tahun	Pertumbuhan	Tahun	Pertumbuhan
1995	-	2000	-25,35
1996	27,07	2001	117,12
1997	21,45	2002	108,56
1998	26,72	2003	-4,32
1999	8,49	2004	-11,45
Rata - rata	7,29	Rata – rata	36,91

Sumbet data : data PAD kabupaten Jembrana,2005

Dari data besarnya rasio efektifitas di atas maka dapat di simpulkan sebelum adanya otonomi daerah besarnya rasio efektifitas yaitu kurang dari 1,00 atau 100% yang berarti bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya di katakan kurang baik, sebaliknya setelah adanya otonomi daerah pemerintah dalam menjalankan tugasnya di katakan baik karena besarnya persentase besarnya rasio efektifitas lebih dari 1.00 atau 100%.

Dengan demikian berdasarkan hasil dari perhitungan analisis di atas dapat di simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah rata- rata kabupaten Jembrana sebelum otonomi dan pada saat otonomi daerah mengalami kenaikan atau ada perbedaan yang signifikan.

Bahwa dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah kabupaten Jembrana, karena besarnya pendapatan asli daerah sebelum otonomi

daerah lebih kecil dari pada saat otonomi daerah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur daerahnya serta menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.